AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 1, April 2024 ISSN: 3031-7029

Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK di Indonesia

Arif Muktiono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
arifmuktiono23@gmail.com

Kata Kunci:

Perempuan
Penggerak PKK
Peran Pemerintah Desa

Abstract

Women's powerlessness does not only come from other people but also from themselves, where many women feel unworthy and unable to try new things. In writing this scientific work, the author uses a library research method in which the source of literature comes from books, archival documents, newspapers and journals that have been published first. The formulation of the problem is (1) What is meant by the PKK movement and its scope, (2) PKK's efforts in empowering women, especially villages in Indonesia, (3) Challenges in empowering women in Indonesia, (4) The role of village governments in empowering women. And the conclusions are (1) PKK is a movement that aims to empower women. PKK is a community development movement that originated from a household economy seminar held in Bogor in 1975 by producing 10 formulations in terms of family life, (2) PKK's efforts in empowering women, especially in villages, are by conducting (a) job skills training, (b) conducting training on financial services and microcredit, (c) providing work information focused on women's needs, (d) optimizing technology and communication information in the women's business chain, (e) collaborating with the private sector to provide work assistance and employment for women, (3) the challenges faced in empowering women are (a) lack of willingness from the women themselves, (b) lack of understanding from the women themselves (c) many women are still not literate in education and think women only sit at home taking care of family and children, (d) there is still a gender gap in the territory of Indonesia, (e) limited access to education and training, (f) lack of interest from women in developing opportunities in business from the government. (4) The role of the village government in empowering women is (a) increasing the number of women in terms of economic or employment activities, (b) increasing the number of women in making decisions in government, (c) targeting 30% representation of women in legislative elections, (d) increasing literacy rates through various programs including illiteracy or literacy education programs, (e) improving the quality of health services for mothers and children and providing education and. Socialization to pregnant women and prospective parents to use qualified birth attendants.

Abstrak

Ketidakberdayaan perempuan itu bukan saja berasal dari orang lain akan tetapi juga berasal dari diri perempuan itu sendiri, dimana perempuan banyak merasa tidak layak dan tidak sanggup dalam mencoba hal baru. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana sumber literatur nya berasal dari buku, dokumen kearsipan,surat kabar dan jurnal yang telah terbit lebih dulu. Adapun rumusan masalah nya adalah (1) Yang dimaksud dengan gerakan PKK dan ruang lingkup nya, (2) Upaya PKK dalam pemberdayaan perempuan khususnya desa-desa di Indonesia, (3) Tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, (4) Peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan perempuan. Dan kesimpulan nya adalah (1) PKK adalah suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan perempuan. PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari seminar ekonomi rumah tangga yang bertempat di Bogor pada tahun 1975 dengan

menghasilkan 10 rumusan dalam segi kehidupan keluarga, (2) upaya PKK dalam pemberdayaan perempuan khususnya di desa adalah dengan melakukan (a) pelatihan keahlian kerja, (b) melakukan pelatihan tentang pelayanan keuangan dan juga kredit mikro, (c) memberikan informasi kerja yang difokuskan pada kebutuhan perempuan, (d) mengoptimalkan teknologi dan juga informasi komunikasi dalam rantai bisnis perempuan, (e) melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan pendampingan kerja dan lapangan kerja bagi perempuan, (3) tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan adalah (a) kurangnya kemauan dari perempuan itu sendiri, (b) kurang nya pemahaman dari diri perempuan itu sendiri(c) banyak perempuan yang masih kurang melek akan pendidikan dan berpikir perempuan hanya duduk dirumah mengurus keluarga dan anak, (d) masih ada kesenjangan gender di wilayah Indonesia, (e) keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, (f) kurangnya ketertarikan dari perempuan dalam mengembangkan kesempatan dalam berusaha dari pemerintah. (4) peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan adalah (a) meningkatkan jumlah perempuan dalam hal kegiatan ekonomi atau ketenagakerjaan, (b) meningkatkan jumlah perempuan dalam mengambil keputusan di pemerintahan, (c) menargetkan keterwakilan 30% perempuan dalam pemilu legislatif, (d) meningkatkan angka melek huruf melalui berbagai program diantaranya program buta huruf atau pendidikan aksara, (e) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak serta memberikan edukasi dan. Sosialisasi kepada ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualitas.

Corresponding Author:

Arif Muktiono
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
arifmuktiono23@gmail.comNama Penulis

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang memiliki segudang potensi dalam menentukan kemana arah keberhasilan suatu pembangunan bangsa adalah perempuan. Hingga pada era globalisasi dan teknologi yang kian meningkat ini perempuan terutama di desa masih termarjinalkan keberadaan dan eksistensi nya. Pada dasarnya perempuan dimanapun berada masih identik dengan hal-hal domestik seperti urusan dapur, sumur dan juga kasur, pekerjaan perempuan pun hanya terbatas pada mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak. Keterbatasan yang ada pada diri perempuan ini memiliki peran yang besar bagi kondisi perempuan itu sendiri. Dimana banyak perempuan banyak yang tidak memiliki pendidikan yang lebih sehingga membuat para perempuan harus bergantung pada suami dan tidak memiliki kekuatan untuk menjalani permasalahan lainnya. Ketidak berdayaan perempuan itu bukan saja berasal dari orang lain tetapi juga pada diri sendiri, dimana seorang perempuan merasa tidak layak, tidak sanggup dan tidak berani untuk mencoba hal-hal baru yang bersifat positif tentunya.[1]

Perempuan yang tidak mandiri adalah mereka yang belum menemukan jati diri dan segala bentuk kemampuan yang ada pada dirinya, dan perempuan yang mandiri adalah mereka yang sudah menemukan jati diri mereka sendiri, sudah bisa melihat potensi yang ada pada diri sendiri dan memiliki kreativitas, karismatik dan kuat dalam menghadapi segala macam masalah. Sebagai seorang perempuan haruslah mampu menjadi mandiri dan mampu menyelesaikan masalah apapun sendiri baik itu masalah sosial, budaya, politik bahkan ekonomi, karena jika selalu mengandalkan suami ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka perempuan akan merasa terpuruk bahkan tertekan sehingga tidak dapat menerima segala hal yang terjadi dan akhirnya menjadi depresi.[2]

Untuk hal pembangunan,jika dilihat pada saat ini tentu telah berkembang cukup pesat dan cukup memadai dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri telah disiapkan di seluruh Indonesia terutama di desa. Proses pembangunan di pedesaan tidak kalah berkembang dari pembangunan yang ada di kota dimana pembangunan dan sarana prasarana juga telah memadai sehingga dengan adanya pembangunan yang ada di desa dapat mendobrak dan menunjang perekonomian di negara Indonesia khusus nya. Salah satu faktor yang ada di desa adalah di bidang pertanian dimana hasil pertanian dapat menunjang perekonomian bukan saja pada masyarakat tetapi juga negara itu sendiri. Selain itu berbagai macam usaha juga dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa dan juga pemberdayaan perempuan yang ada di desa, dimana salah

[1] Cora Vrede, *"Sejarah Perempuan Indonesia* ", Jakarta: Komunitas Bambu, 2001, hlm. 3
[2] Iwan Abdullah, "*Sejarah Kebangkitan Nasional Perempuan"* Jakarta: Kencana, 2002, hlm. 3

satu usaha yang dilakukan adalah dengan mengembangkan berbagai organisasi-organisasi yang ada di desa melalui berbagai macam pembinaan bagi perempuan khususnya, adapun organisasi tersebut adalah sebagai berikut:[3]

1. Program organisasi PNPM mandiri
2. Program pengembangan kecamatan dan
3. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang dikenal dengan PKK

Tidak hanya laki-laki saja yang boleh masuk dan berorganisasi tetapi, para perempuan pun harus terlibat dalam suatu organisasi tertentu, dan perempuan juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan menggerakkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Adapun salah satu tempat atau wadah organisasi khusus perempuan yang dibina oleh pemerintah desa yang beranggotakan para masyarakat desa dan kelurahan adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK.

Di era emansipasi sekarang ini, perempuan acapkali dianggap sebagai kelompok kedua sehingga perempuan tidak memiliki hak sepenuhnya dari pada laki-laki, perempuan dinilai hanya becus dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga saja, bahkan perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti organisasi karena jika mengikuti organisasi maka akan memperlambat proses pekerjaan di rumah tangga.Seiring berjalannya waktu perempuan mulai bangkit dan juga berhasil dan terdapat banyak pergerakan nasional yang muncul dan berkembang karena perempuan juga berhak ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak nya dan juga berhak mengikuti pergerakan nasional. Semangat nasionalisme tumbuh dan berkembang serta berdampak besar bagi perempuan pribumi sama halnya laki-laki yang mengembangkan kesadaran akan suatu situasi dan juga kondisi dalam kehidupan bermasyarakat yang terjajah. Pergerakan perempuan itu sendiri pada awalnya bermula pada tahun 1908 sampai dengan 1920 di abad ke 20 dimana gerakan perempuan masih identik dengan perjuangan di bidang sosial dan juga pendidikan. Dimana pada masa itu perempuan lebih fokus kepada kedudukan dan juga keterampilan sosial melalui pendidikan dan juga peningkatan kehidupan berkeluarga dan juga peningkatan pada keterampilan sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya.[4] Pada abad ini perempuan masih bergerak individu dan bukan dalam bentuk organisasi akan tetapi gerakan tersebut menjadi langkah awal dalam proses reformasi. Gerakan individu yang muncul ini mulai berkembang menjadi suatu organisasi pergerakan perempuan yang sudah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada saat itu, dan diusahakan untuk memberikan pengetahuan, pendidikan dan juga pengajaran bagi anak perempuan untuk meningkatkan status sosial.

Pada tahun 1920-1930 muncullah pergerakan perempuan yang menonjolkan keinginan untuk kearah politik, banyak partisipasi perempuan dalam melakukan pergerakan dan pemberdayaan di berbagai organisasi, dimana perempuan juga berperan dalam keluarga sebagai pusat keluarga dan menjadi guru pertama bagi anak-anak nya.Dan pada tahun 1930-1941 perempuan telah banyak berubah dan banyak perempuan yang mendukung berbagai gerakan dan muncullah berbagai gerakan nasional perempuan. Dan dalam pergerakan ini muncullah pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat mandiri dan dapat memperjuangkan hak-hak nya tanpa merasakan intimidasi dari berbagai kalangan.[5]

Jika dilihat di kota-kota besar banyak perempuan yang terjun ke dalam berbagai macam organisasi dan jika dilihat di desa pun demikian, adapun salah satu organisasi pemberdayaan perempuan yang ada di desa adalah PKK, dimana organisasi ini memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan bagi para perempuan tanpa terkecuali, dimana pemberdayaan ini bersifat umum untuk dapat membina keluarga yang harmonis, sejahtera, maju, hidup sehat dan mandiri. Pkk memiliki suatu kelompok yang disebut dengan dasawisma dimana suatu kelompok yang terdiri dari sepuluh sampai dua puluh anggota yang berupa ibu-ibu rumah tangga dalam suatu rukun tetangga. Gerakan Pemberdayaan PKK ini tentunya ada di setiap kota dan desa, yang menjadi titik tolak ukur pemberdayaan perempuan itu terdapat di desa dimana disana terdapat kelompok PKK dan Dasawisma yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Contoh desa yang memiliki pemberdayaan perempuan melalui PKK Adalah Desa Sumber Makmur Jaya,di mana di desa ini gerakan PKK nya sangat maju dan dalam setiap bulannya pasti kelompok PKK desa Sumber Makmur Jaya melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk melatih kesiap siagaaan para ibu-ibu agar dapat berperan aktif dalam mengatur perekonomian rumah tangga dan juga membantu perekonomian rumah tangga. Berdasarkan penjabaran dari pendahuluan diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana sumber data nya berasal dari surat kabar, koran, dokumentasi, laporan kearsipan, buku dan jurnal penelitian terdahulu, dimana metode

[3] Selfi Mahat Putri, "*Penggerak PKK"* Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 4
[4] M. MC, Ricklef, "*Sejarah Indonesia Modern"*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 12
[5] Tim Penggerak Pusat, *"Kelembagaan PKK"* Jakarta, 2015

penelitian kepustakaan adalah suatu metode penulisan yang dilakukan dengan menggunakan literatur yang bersumber dari buku, jurnal dan lain sebagainya.[6]

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Gerakan PKK Dan Ruang Lingkupnya

PKK merupakan suatu kepanjangan dari Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dimana tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari unit paling kecil yaitu keluarga. PKK pada dasarnya identik dengan perempuan dan padahal PKK ini bisa digerakkan oleh laki-laki yang memang ditunjuk menjadi bagian dari tim penyelenggara nya. Tim penggerak PKK yang berada di desa atau kelurahan dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan. Dan hal ini juga telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan peraturan presiden dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 yang mencabut peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.[7]

PKK adalah suatu gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari seminar ekonomi rumah tangga yang bertempat di Bogor pada tahun 1957 dengan menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK adalah suatu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya berupa bimbingan, pembinaan dan juga pemberdayaan agar suatu keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Adapun tim penggerak PKK sendiri adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang memiliki fungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan juga penggerakan pada masing-masing jenjang demi terlaksana nya program PKK. Dan pada dasarnya tim penggerak PKK ini adalah warga masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, individu, yang bersifat sukarela tidak mewakili suatu organisasi manapun, baik itu golongan, parpol, lembaga maupun instansi terkait dan memiliki fungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian gerakan PKK itu sendiri.

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan. Secara umum, tentunya pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam kegiatan PKK adalah sebagai berikut:[8]

1. Melakukan kegiatan pelatihan untuk UMKM
2. Melakukan pengajian rutin
3. Menghadiri berbagai macam seminar baik itu berupa pendidikan maupun kesehatan reproduksi, keluarga berencana, masalah kekerasan dalam rumah tangga dan tentang kesehatan anak dan ekonomi keluarga

Sebagai gerakan nasional yang berada dibawah naungan menteri dalam negeri, PKK memiliki sejumlah fungsi diantara adalah sebagai berikut:[9]

1. Fungsi pembinaan, menghimpun, menggerakkan potensi masyarakat agar dapat terlaksana nya program-program pokok PKK
2. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Fungsi pembinaan yang melibatkan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai kepada kelompok Dasawisma
4. Fungsi supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang yang terkait dengan program-program dari gerakan PKK itu sendiri
5. Dan berfungsi sebagai penampung dan penyalur segala bentuk aspirasi masyarakat

Sedangkan tugas dari PKK itu sendiri adalah untuk melakukan pendataan potensi terhadap masing-masing keluarga dan juga masyarakat, menggerakkan peran masyarakat serta mengendalikan 10 program pokoknya agar mampu berjalan dengan baik dan juga maksimal. Dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2020,10 program pokok PKK adalah sebagai berikut:[10]

1. Program penghayatan dan pengamalan pancasila contohnya adalah pembinaan keluarga yang sadar hukum
2. Program gotong royong seperti contohnya adalah berpartisipasi dalam program pembangunan dan bakti sosial di lingkungan tempat tinggal
3. Melakukan program pangan di mana contohnya adalah menggerakkan keluarga untuk dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi

---

[6] A.Daliman, "*Metode Penelitian Sejarah"* Yogyakarta : Ombak Press, 2017, hlm. 43

[7] Audra Jovani, "Organisasi Gerakan Perempuan" *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1,(Januari 2000), hlm. 2

[8] Audra Jovani " PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan " *Jurnal Tria Politika,* Volume 2, Nomor 1, (Desember 2002), hlm. 4

[9] Jam'ah, Harahap, " PKK Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa" *Jurnal Tria Politika,* Volume 1,Nomor 1, (Juni 2003), hlm. 5

[10] Nurhayati, "Peran PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan" *Jurnal Hukum Indonesia,* Volume 1, Nomor 4, (Maret 2020), hlm. 12

4. Merealisasikan program sandang dengan contohnya berupa mengembangkan pola pendampingan kepada para usaha sandang yang berskala kecil atau juga mikro
5. Program perumahan dan tatalaksana rumah tangga, dimana contohnya adalah dengan membina masyarakat terkait rumah sehat layak huni
6. Program pendidikan dan keterampilan dimana contohnya adalah dengan meningkatkan keterampilan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK
7. Melakukan gerakan kesehatan dengan pembinaan keluarga sehat dan sadar gizi
8. Kelakuan program pengembangan kehidupan berkoperasi, yang contohnya berupa pengembangan kreativitas melalui UMKM berbasiskan teknologi informasi
9. Melakukan program kelestarian hidup yang membina keluarga dalam memelihara dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan tempat tinggal
10. Melakukan program perealisasian perencanaan sehat dengan membina keluarga untuk meningkatkan keluarga berencana yang berkualitas

1.2 Upaya PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan Khususnya Desa Di Indonesia

Dalam hal usaha tim penggerak PKK untuk melakukan pemberdayaan perempuan khususnya di desa adalah dengan melakukan peningkatan pendapatan keluarga atau yang dikenal dengan UP2K. Peningkatan pendapat keluarga adalah suatu program yang bertujuan untuk menanggulangi terjadi nya kemiskinan khususnya bagi kaum perempuan.Adapun sumber dana dari program ini adalah berasal dari dana Inpres Bantuan desa melalui PKK. Adapun kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan kegiatan usaha kecil yang telah bergabung melalui suatu kelompok maupun individu sehingga secara bertahap diharapkan mampu menjadi wiraswasta yang handal serta meningkatkan tumbuh nya kegiatan keluarga yang sejahtera. Dengan meningkatkan pendapatan keluarga dalam usaha mewujudkan keluarga yang sejahtera perlu adanya perkembangan usaha sampingan seperti contoh usaha nya adalah berupa usaha catering, membuat roti dan kue serta lain sebagainnya.[11]

Selain itu usaha PKK dalam memberdayakan perempuan khususnya di desa adalah dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang mana ibu-ibu peserta PKK harus turut andil dalam hal ini, seperti contohnya adanya penyuluhan tentang menabung, sosialisasi tentang tanaman obat-obatan, penyuluhan tentang sosialisasi keluarga berencana atau KB. Hal ini dilakukan agar perempuan guna menjadi perempuan yang lebih baik dan memiliki pengetahuan yang luas. Peran PKK ini bagi pemerintah daerah atau desa sangat besar dimana dengan adanya PKK dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan keluarga yang memiliki budaya, hidup sejahtera, maju, mandiri dan tentu saja harmonis. Selain itu peran PKK dalam melakukan pemberdayaan perempuan ini adalah untuk menumbuh kembangkan potensi dan juga peran perempuan dalam hal peningkatan pendapatan keluarga. Adapun pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah dengan melakukan:[12]

1. Melakukan pelatihan keahlian kerja
2. Melakukan pelatihan tentang layanan keuangan dan juga kredit mikro
3. Memberikan informasi kerja yang difokuskan pada kebutuhan perempuan
4. Mengoptimalkan teknologi dan juga informasi komunikasi dalam rantai bisnis perempuan dan
5. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan pendampingan kerja dan juga lapangan kerja khusus bagi perempuan

Selain itu pada bidang pendidikan juga perlu adanya pengembangan melalui jalur formal untuk perempuan prasejahtera dan pendidikan nonformal melalui sekolah perempuan yang mencakup pendidikan baca tulis dan life skill termasuk juga pembedahan ekonomi, dan untuk bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dilakukan dengan peningkatan gizi untuk perempuan, melakukan konseling untuk kesehatan pranikah dan penundaan usia perkawinan. Dan dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemangku kepentingan dengan pemerintah dan juga masyarakat karena pada dasarnya perempuan menjadi tanggung jawab dari pemimpin dan anggota masyarakat.

1.3 Tantangan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Ketidaksetaraan gender juga memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan bahkan sampai keuangan.Untuk memahami kondisi ini terlebih dahulu perlu memahami tentang kondisi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, dimana ketidakadilan dalam perempuan ini dipicu dengan adanya budaya patriarki. Kondisi ketertinggalan perempuan dikarenakan kurangnya wawasan sehingga menjadikan perempuan tidak berdaya, menjadi subordinatif lelaki sehingga menghambat pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan terhadap perempuan sebagai usaha untuk meningkatkan akses, kontrol dan juga partisipasi

[11]Nurfadillah, "Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK" *Jurnal Comm Edu*, Volume 1, Nomor 2, (Maret 2008), hlm. 10

[12] Puspitasari, *"Konsep Dan Teori Keluarga"* Jakarta: UI Press, 2000, hlm. 30

perempuan dalam proses sosial, ekonomi dan politik serta manfaat yang dapat dinikmati oleh perempuan itu sendiri.

Ada berbagai isu perempuan di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, pernikahan, anak, ekonomi, politik hingga masalah tentang kekerasan terhadap perempuan, di bidang pendidikan dapat dilihat bahwa partisipasi murni para perempuan di tingkat perguruan tinggi masih cukup rendah. Begitu pula angka harapan lama sekolah perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Dan dalam hal pernikahan itu sendiri, banyak perempuan yang usia 20 hingga 24 tahun yang sudah menikah dan ada juga yang menikah pada usia 18 tahun bahkan ada pula yang sudah menikah di usia 15 tahun. Sedangkan di bidang ekonomi tingkat pengangguran bagi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berbagai macam kondisi yang telah dialami oleh para perempuan ini pemerintah melalui gerakan PKK telah mengembangkan model cluster dalam melakukan pemberdayaan perempuan baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan.

Keberadaan perempuan itu sendiri dapat diperhitungkan untuk pembangunan yang berkelanjutan dimana peran perempuan untuk keberhasilan pembangunan akan dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup dan juga peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Adapun tantangan dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut;[13]

1. Kurang nya kemauan dari perempuan itu sendiri
2. Kurang nya pemahaman dari diri perempuan itu sendiri
3. Banyak perempuan yang masih kurang melek akan pendidikan dan berpikiran bahwa perempuan hanya duduk dirumah mengurus keluarga dan anak
4. Masih ada kesenjangan gender di berbagai wilayah di Indonesia

Selain itu tantangan dalam pemberdayaan perempuan khususnya di desa adalah sebagai berikut;[14]

1. Tingginya tingkat patriarki dan budaya yang memarginalkan perempuan
2. Adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan
3. Adanya keterbatasan pelayanan kesehatan yang berkualitas
4. Adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan dan modal usaha
5. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal terkait masalah pentingnya pemberdayaan perempuan desa

Pemberdayaan perempuan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan dan juga kemandirian kepada perempuan di lingkungan desa. Melalui pemberdayaan , perempuan didorong untuk dapat mengambil peran aktif dalam perkembangan pembangunan lokal dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, pendidikan dan kesehatan serta pekerjaan. Dengan memperkuat peran pemerintah desa diharapkan dalam membantu terciptanya masyarakat yang lebih baik, adil dan berkelanjutan serta inklusif.Sedangkan tantangan pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :[15]

1. Kurangnya kesadaran masyarakat desa terhadap potensi dan keterampilan yang dimiliki
2. Rendah nya sumber daya manusia yang ada di desa
3. Kurang nya partisipasi dalam suatu kegiatan seperti kegiatan usaha kecil menengah
4. Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat desa dalam penerapan aturan tentang pemberdayaan perempuan
5. Belum adanya musyawarah terkait aturan yang mengacu kepada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi
6. Kurang nya pemahaman perempuan tentang diskriminasi
7. Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam melakukan pelatihan dan pembinaan
8. Kurangnya kemampuan dalam mengelola bantuan dana
9. Kurang nya kepedulian dalam hal pemeliharaan usaha kecil menengah
10. Dan perempuan kurang tertarik dalam mengembangkan kesempatan dalam berusaha dari pemerintah desa

1.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan

Dalam pembangunan nasional itu sendiri pada dasarnya memerlukan berbagai perbaikan kualitas hidup di berbagai bidang aspek kehidupan, dimana dalam pembangunan ini perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Di desa sumber makmur jaya terdapat beberapa pemberdayaan masyarakat, pembinaan perempuan desa dan program pengembangan ekonomi desa. Dimana program pembedahan masyarakat ini dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan program pembayaran kesejahteraan keluarga atau yang disingkat dengan PKK. PKK adalah suatu program pemberdayaan perempuan yang dapat meningkatkan kearifan lokal dan juga kreativitas bagi perempuan yang berada di desa Sumber Makmur Jaya. Dan terlaksananya program pemberdayaan

[13] Riana Dewi, "Pelaksanaan Tim Penggerak PKK Dalam pemberdayaan Perempuan" *Jurnal Administrasi Publik",* volume 1,Nomor 1, (Agustus 2017, hlm. 2

[14] Shalfiah"Tantangan Dalam Pemberdayaan Perempuan " *Jurnal Administrasi Publik,* Volume 2, Nomor 2,(Agustus 2017), hlm. 3

[15] Suhendi"Tantangan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia " *Jurnal Ilmu Pemerintahan,* Volume 1, Nomor 3, (Desember 2013), hlm. 6

perempuan di desa Sumber Makmur Jaya ini tidaklah terlepas daripada dukungan pemerintah desa setempat, khususnya kepala desa. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan sangat lah penting karena dengan adanya peran kepala desa maka kepala desa dapat memberikan arahan dan juga memotivasi semua anggota PKK dalam melaksanakan tugas nya. Selain itu kepala desa juga berperan dalam memantau seluruh kegiatan PKK baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pemantauan yang dilakukan secara tidak langsung adalah dengan memantau menggunakan whatsapp. Mengenai berbagai macam program yang ada di PKK tersebut dan juga menganalisis kebutuhan masyarakat, dimana ketua PKK harus selalu melakukan koordinasi kepada anggota lainnya agar tidak bekerja sendiri dan harus melibatkan banyak pihak terutama pemerintah desa itu sendiri.[16]

Masyarakat seringkali memahami bahwa gender adalah sama dengan jenis kelamin atau juga gender berhubungan dengan perempuan. Padahal kata gender bisa diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi ras dan juga etnis, akan tetapi masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perdebatan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Diskriminasi berdasarkan gender masih selalu terjadi di setiap aspek kehidupan, baik itu di Indonesia maupun seluruh dunia, dan hal ini adalah suatu fakta walaupun pada dasarnya kemajuan yang cukup pesat tetap terjadi diskriminasi dalam kesetaraan gender. Sifat dan juga diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai daerah dan wilayah.

Intervensi pemerintah dalam mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kebijakan dalam membentuk suatu program dan strategi dalam pengaruh utama gender atau yang disingkat dengan PUG. PUG adalah sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan juga sistematis untuk mencapai suatu kesetaraan dan juga keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia baik itu rumah tangga,masyarakat dan juga negara. Melalui kebijakan dan juga program yang juga memperhatikan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan antara permasalahan perempuan dan juga laki-laki ke dalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan juga pembangunan.

Dalam hal program pemberdayaan khususnya perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Yang mana melalui pemberdayaan dari beberapa daerah telah memperoleh hasil yang baik dan juga memadai dalam peningkatan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup khususnya kaum perempuan. Akan tetapi masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh dengan adanya program pemberdayaan ini baik itu di perkotaan apalagi di pedesaan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap suatu partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan dan juga pengambilan keputusan itu sendiri yang tidak bertransformasi dan mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan juga laki-laki. Pada presidensi G20 yang diadakan di Indonesia pada tahun 2022 menjadi suatu momentum yang baik untuk terus mengadvokasi berbagai pihak dan kalangan. [17]Terutama masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai hal dan upaya dalam mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya.

Kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan ni termasuk dalam salah satu topik pada konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Dimana ada enam isu yang diprioritaskan dan identik dengan dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan diantaranya adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi dan juga pendidikan. Dalam peningkatan pemberdayaan kaum perempuan pemerintah pusat dan pemerintah desa telah melakukan beberapa peran diantaranya adalah :[18]

1. Meningkatkan jumlah perempuan dalam hal kegiatan ekonomi atau ketenagakerjaan
2. Meningkatkan jumlah perempuan dalam mengambil keputusan di pemerintahan
3. Menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif
4. Menerapkan wajib belajar 12 tahun khususnya bagi perempuan
5. Meningkatkan angka melek huruf melalui berbagai program diantaranya adalah program buta huruf atau pendidikan keaksaraan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak.
7. Pemerintah juga memberikan edukasi bagi pada ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualitas dan menyusui bayi selama dua tahun.

Masyarakat harus bersama-sama bahu membahu dalam menciptakan akses dan juga kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan juga budaya khususnya bagi perempuan agar perempuan dapat mengatur diri dan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu memecahkan segala problematika

[16] Syamsudin, " Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan " *Jurnal Studi Agama Islam,* Volume 1, Nomor 1, (Januari 2015), hlm 110

[17] Wahyuningsih" *Peran Pemerintah Dan Penggerak PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan "* Surakarta: Satu Karya Karsa, 2019, hlm. 120

[18]Husna, N. " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Desa Di Indonesia " *Jurnal Al-Bayan,* Volume 2, Nomor 1, (Desember 2018), hlm. 6

kehidupan. Oleh karena itu pemerintah desa harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan tempat tinggal nya dan juga membantu masyarakat dalam membebaskan diri dari keterbelakangan. Dan peran pemerintah desa serta penggerak PKK dalam melakukan pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di desa dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan teknologi yang sesuai dengan potensi dan juga keterampilan bagi para perempuan, pemerintah desa dibantu oleh ibu-ibu penggerak PKK lainnya dapat menyediakan sarana dan juga prasarana dalam bidang pendidikan yang memadai, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi dan juga melakukan motivasi serta sosialisasi dan musyawarah dengan badan permusyawaratan desa guna merumuskan aturan - aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial untuk kaum perempuan, pemerintah desa mengajak perempuan untuk dapat mengikuti berbagai macam pelatihan dan juga pembinaan tentang usaha kecil menengah dan juga mensosialisasikan kegiatan usaha kecil menengah. Selain itu pemerintah desa juga berperan dalam memberikan pelatihan mengenai akses pemasaran dan juga pemeliharaan sumber daya manusia agar dapat menciptakan manusia khususnya perempuan yang berpotensi.[19]

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pemberdayaan kesejahteraan perempuan atau yang dikenal dengan PKK merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari unit paling kecil yaitu keluarga. PKK pada dasarnya identik dengan perempuan dan dalam gerakan PKK pun telah dicantumkan dalam peraturan presiden nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dan pelaksanaan peraturan presiden dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 yang mencabut peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari seminar ekonomi rumah tangga yang bertempat di Bogor pada tahun 1975 dengan menghasilkan 10 rumusan dalam segi kehidupan keluarga.

Pengertian PKK sendiri adalah suatu gerakan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah meningkatkan kegiatan pelatihan untuk UMKM, melakukan pengajian rutin, menghadiri berbagai macam seminar baik berupa pendidikan maupun kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Adapun upaya PKK dalam pemberdayaan perempuan khususnya di desa adalah dengan melakukan (1) pelatihan keahlian kerja, (2) melakukan pelatihan tentang pelayanan keuangan dan juga kredit mikro, (3) memberikan informasi kerja yang difokuskan pada kebutuhan perempuan, (4) mengoptimalkan teknologi dan juga informasi komunikasi dalam rantai bisnis perempuan dan (5) melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan pendampingan kerja dan juga lapangan kerja khususnya bagi perempuan.

Selain upaya PKK dalam pemberdayaan perempuan tentu di dalam pelaksanaanya terdapat tantangan, adapun tantangan yang dihadapi oleh PKK dalam pemberdayaan perempuan adalah (1) kurangnya kemauan dari perempuan itu sendiri, (2) kurang nya pemahaman dari diri perempuan itu sendiri, (3) banyak perempuan yang masih kurang melek akan pendidikan dan berpikir bahwa perempuan hanya duduk di rumah mengurus keluarga dan anak, (4) masih ada kesenjangan gender di berbagai wilayah di Indonesia, (5) adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan dan juga pelatihan, (6) kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal terkait masalah pentingnya pemberdayaan perempuan desa (7) kurangnya ketertarikan dari perempuan dalam mengembangkan kesempatan dalam berusaha dari pemerintah desa. Untuk itu PKK bekerja sama dengan pemerintah desa untuk dapat melaksanakan pemberdayaan perempuan ini. Adapun peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan adalah (1) meningkatkan jumlah perempuan dalam hal kegiatan ekonomi atau ketenagakerjaan, (2) meningkatkan jumlah perempuan dalam mengambil keputusan di pemerintahan pemerintahan, (3) menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif, (4) menerapkan wajib belajar 12 tahun khususnya bagi perempuan, (5) meningkatkan angka melek huruf melalui berbagai program diantaranya adalah program buta huruf atau pendidikan aksara, (6) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak dan (7) pemerintah berperan dalam memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada ini hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualitas dan menyusui bayi hingga 2 tahun.

4.2 Saran/Rekomendasi

Diharapkan kepada semua perempuan untuk dapat mengikuti program pemberdayaan perempuan agar dapat menjadi perempuan yang mandiri dan bisa mencintai diri sendiri serta terlepas dari intimidasi gender dan lain sebagainya.

[19]Rantung J, Mandey, "Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Tria Politika*Volume 1, Nomor 1, (Maret 2019), hlm. 13

REFERENSI

Abdullah, Iwan, 2002. *Sejarah Kebangkitan Nasional Perempuan,* Jakarta: Kencana

Daliman, A. 2017. *Metode Penelitian Sejarah,* Yogyakarta: Ombak Press

Puspitasari, 2000.*Konsep Dan Teori Keluarga"*, Jakarta: UI Press

Putri, Selfi mahat, 1990. *Penggerak PKK,* Jakarta : Bumi Aksara

Ricklef, M. MC, 2008. *Sejarah Indonesia Modern,* Jakarta: Kencana

Tim Penggerak Pusat, *Kelembagaan PKK,* Jakarta: 2015

Vrede, Cora, 2001. *Sejarah Perempuan Indonesia,* Jakarta: Komunitas Bambu

Wahyuningsih, 2019. *Peran Pemerintah Dan Penggerak PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan,* Surakarta: Satu Karya Karsa

Dewi, Riana, "Pelaksanaan Tim Penggerak PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Administrasi Publik,* Volume 1, Nomor 1, (Agustus 2017)

Harahap, Jam'ah, " PKK Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa" *Jurnal Tria Politika,* Volume 1, Nomor 4, (Juni 2003)

Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, *9*(2), 2265522.

Komala, F., & Ridwan, M. (2022). KEINDAHAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), 140–146.

Jovani, Audra, " PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan" *Jurnal Tria Politika,* Volume 2, Nomor 1, (Desember 2002)

Jovani, Audra, "Organisasi Gerakan Perempuan", *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1, (Januari 2000)

Mandey, Rantung J, "Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat" *Jurnal Tria Politika,* Volume 1, Nomor 1, (Maret 2019)

N. Husna, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Desa Di Indonesia" *Jurnal Al-Bayan,* Volume 2, Nomor 1, (Desember 2018)

Nurfadillah, "Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK", *Jurnal Comm Edu,* Volume 1, Nomor 2, (Maret 2008)

Nurhayati, "Peran PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan" *Jurnal Hukum Indonesia,* Volume 1, Nomor 4, (Maret 2020)

Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(2), 104–112.

Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, *4*(4), 537–547.

Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), 155–163.

Shalfiah, " Tantangan Dalam Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Administrasi Publik,* Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2017)

Suhendi, "Tantangan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan,* Volume 1, Nomor 3, (Desember 2013)

Syamsudin, " Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan" *Jurnal Studi Agama Islam*, Volume 1, Nomor 1 , (Januari 2015)